



**PENGARUH PENYERAPAN TENAGA KERJA, INVESTASI
PEMERINTAH DAN INVESTASI SWASTA TERHADAP
SOSIAL WELFARE DI KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2005 -2017**

Skripsi

**Disusun oleh
Riqi Dzulqornain
(130810101050)**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2020**



**PENGARUH PENYERAPAN TENAGA KERJA, INVESTASI
PEMERINTAH DAN INVESTASI SWASTA TERHADAP
SOSIAL WELFARE DI KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2005 -2017**

Skripsi

**Disusun oleh
Riqi Dzulqornain
(130810101050)**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2020**

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ibunda Setika dan Ayahanda Marji tercinta atas segala dukungan baik dalam doa, kasih sayang, semangat, dan pengorbanan yang tak terhingga kepada penulis;
2. Guru-guru sekolahku dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi, serta guru-guru tercintaku yang selalu memberikan sumbangsih ilmu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan;
3. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kemampuannya”
(QS. Al-Baqarah: 286)

“Tenangkan Hati Menuju Puncak Prestasi ”
(Alm. Khusnul Huda)

“Jangan pernah putus asa saat merasa dalam kesulitan, sebab Allah menyertakan
kemudahan setelah kesulitan”
(Gua Baha)

PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Riqi Dzulqornain

NIM : 130810101050

Judul : Pengaruh Penyerapan Tenaga Kerja, Investasi Pemerintah, Investasi Swasta, , Terhadap Sosial Welfare diKabupaten Lamongan 2005-2017

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang benar.

Demikian pernyataan yang saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Jember,

Yang Menyatakan,

Riqi Dzulqornain

NIM. 130810101050

SKRIPSI

**PENGARUH PENYERAPAN TENAGA KERJA, INVESTASI
PEMERINTAH, INVESTASI SWASTA, , TERHADAP SOSIAL
WELFARE DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2005-2017**

Oleh

Riqi Dzulqornain
NIM 130810101050

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama	: Prof. Dr. Mohammad Saleh, M.Sc
Dosen Pembimbing Anggota	: Dra. Anifatul Hanim, M.Si

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi: Pengaruh Penyerapan Tenaga Kerja, Investasi Pemerintah, Investasi Swasta, Inflasi, Terhadap Sosial Welfare di Kabupaten Lamongan 2012-2017

Nama Mahasiswa : Riqi Dzulqornain

NIM : 130810101050

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Ilmu Ekonomi

Konsentrasi : ESDM

Tanggal Persetujuan :

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Mohammad Saleh, M.Sc
NIP. 195608311984031002

Dra. Anifatul Hanim, M.Si
NIP. 196507301991032001

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Dr. Riniati, M.P.
NIP. 196004301986032001

PENGESAHAN

Judul Skripsi

**PENGARUH PENYERAPAN TENAGA KERJA, INVESTASI
PEMERINTAH, INVESTASI SWASTA, , TERHADAP SOSIAL
WELFARE DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2005-2017**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Riqi Dzulqornain
NIM : 130810101050
Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

.....

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Dra. Nanik Istiyani, M.Si (.....)
NIP. 1961011221987022002
2. Sekretaris : Dr. Sebastiana Viphindartin, M.Kes. (.....)
NIP. 196411081989022001
3. Anggota : Aisah Jumiati, SE,MP (.....)
NIP. 196809261994032002

Mengetahui / Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan,



Prof. Dr. Isti Fadah, M.Si.
NIP 196610201990022001

*PENGARUH PENYERAPAN TENAGA KERJA, INVESTASI PEMERINTAH,
INVESTASI SWASTA, , TERHADAP SOSIAL WELFARE DI KABUPATEN
LAMONGAN TAHUN 2005-2017*

Riqi Dzulqornain

*Jurusan Ilmu Ekonomi Studi dan Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Jember*

ABSTRAK

Pembangunan ekonomi di negara berkembang dapat diukur dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Pendekatan pertumbuhan ekonomi banyak dilakukan di beberapa daerah dalam mengembangkan sektor-sektor ekonomi daerah yang diharapkan dapat meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Jenis penelitian adalah *explanatory reseach* yang bertujuan mengetahui hubungan antar variabel dimana variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penyerapan Tenaga Kerja, Investasi Pemerintah dan Investasi Swasta terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Lamongan. Metode analisis yang di gunakan dalam penelitia ini adalah menggunakan *Ordinal LeastSquare*. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Penyerapan Tenaga Kerja berpengaruh signifikan positif terhadap Kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lamongan, Investasi Pemerintah tidak berpengaruh signifikan negative Kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lamongan dan investasi Swasta berpengaruh signifikan positif terhadap Kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lamongan.

Kata Kunci: Penyerapan Tenaga Kerja, Investasi Pemerinta, Iinvestasi Swasta, Sosial Welfale

*THE EFFECT OF LABOR ABSORPTION, GOVERNMENT INVESTMENT,
PRIVATE INVESTMENT, ON SOCIAL WELFARE IN LAMONGAN DISTRICT,
2005-2017*

Riqi Dzulqornain

*Development Economics Departemen, Faculty of Economics,
University of Jember*

ABSTRACT

Economic development in developing countries can be measured from high economic growth and increased community welfare. The economic growth approach is widely used in several regions in developing regional economic sectors which are expected to improve community welfare. This type of research is an explanatory research which aims to determine the relationship between variables in which the variables used in this study are Labor Absorption, Government Investment and Private Investment on Community Welfare in Lamongan Regency. The analytical method used in this research is to use Ordinal Least Square. Based on the results of the study, it shows that the labor absorption variable has a significant positive effect on community welfare in Lamongan Regency, Government investment does not have a negative significant effect on community welfare in Lamongan Regency and private investment has a significant positive effect on community welfare in Lamongan Regency.

***Keywords: Labor Absorption, Government Investment, Private Investment,
Social Welfare***

RINGKASAN

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang tidak terlepas dari masalah masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Masalah kesejahteraan masyarakat yang dihadapi oleh Indonesia adalah pesatnya angka kemiskinan dan pengangguran . Indonesia adalah merupakan satu dari banyak negara yang memiliki masalah mengenai kesejahteraan masyarakat. Masalah yang dimaksud adalah masalah mengenai tingginya jumlah kemiskinan, dimana kemiskinan merupakan masalah yang menghambat proses pembangunan. Masalah kesejahteraan masyarakat adalah masalah yang sangat luas dan kompleks. Masalah kemiskinan muncul sebagai imbas dari jumlah tenaga kerja yang tidak seimbang dengan jumlah permintaan lapangan pekerjaan yang tersedia. Kemiskinan yang jumlahnya bertambah terus menerus tentunya akan menambah beban perekonomian daerah dan mengurangi kesejahteraan rakyat. Program pembangunan nasional tidak lepas dari peran pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia di daerah masing-masing, sebagai upaya memperbesar kemampuan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dan serasi dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1997)

Pembangunan ekonomi merupakan pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan aspek lain dalam perekonomian seperti perkembangan pendidikan, perkembangan kemahiran tenaga kerja, perbaikan teknologi, dan kenaikan dalam taraf kemakmuran masyarakat. Pembangunan ekonomi suatu negara atau daerah pada dasarnya merupakan suatu proses interaksi atau hubungan antara berbagai variabel diantaranya adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi, modal, dan lain-lain. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi tidak lepas dari

peran manusia dalam mengelolanya, dimana manusia merupakan tenaga kerja, pelaku pembangunan, input pembangunan dan konsumen dari hasil pembangunan itu sendiri (Sukirno 2013:445).

Pembangunan ekonomi yang baik akan meningkatkan produktivitas dan pendapatan, sehingga lapangan pekerjaan akan meningkat, makan kesempatan kerja akan terjamin. Pembangunan ekonomi yang tinggi akan mengurangi pengangguran dan kemiskinan yang semula ini menjadi masalah secara signifikan. Dengan meningkatkan produktivitas dan kreativitas penduduk, maka dapat menyerap dan mengelola sumber daya yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat karena tingginya pendapatan akan mengurangi kemiskinan dan masyarakat yang tidak mendapat pekerjaan atau pengangguran sehingga tingkat kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat semakin meningkat, sehingga semakin tinggi pendapatan yang didapat oleh daerah maka semakin sejahtera penduduk yang berada pada suatu wilayah, dengan kata lain jumlah penduduk miskin akan berkurang (Sari. 2016)

Penelitian ini menggunakan penelitian *explanatory reseach* yang menjelaskan hubungan antara variabel bebas dan terikat. Tempat dan waktu dilaksanakan di Kabupaten Lamongan selama periode 2005 – 2017. Adapun sumber data yang diambil yaitu dari BPS Jawa Timur, buku literature, jurnal, penelitian terdahulu dan searching internet. Untuk menganalisis penelitian ini apakah ada pengaruh antar variabel bebas (Penyerapan Tenaga Kerja, Investasi Pemerintah dan Investasi Swasta) dengan variabel terikat (Kesejahteraan Masyarakat) maka penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang dilakukan di Kabupaten Lamongan. Jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan juga menggunakan data timeseries. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan *Ordinal LeastSquare*.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Penyerapan Tenaga Kerja dan Investasi Swasta berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat sedangkan

investasi Pemerintah tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di
Kabupaten Lamongan 2005–2017

PRAKATA

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul *“Pengaruh Penyerapan Tenaga Kerja, Investasi Pemerintah dan Investasi Swasta Terhadap Sosial Welfare di Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2017 ”* Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik itu berupa motivasi, nasehat, saran maupun kritik yang membangun. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Mohammad Saleh, M.Sc. selaku dosen pembimbing I yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik dan pengarahan dengan penuh keikhlasan, ketulusan dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Dra. Anifatul Hanim, M.Si. selaku dosen pembimbing II yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik dan pengarahan dengan penuh keikhlasan, ketulusan dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Dr. M. Adenan, MM. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) selama kuliah terimakasih atas bimbingannya selama penulis menjadi mahasiswa;
4. Prof. Dr. Isti Fadah, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
5. Dr Rinianti, MP.. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
6. Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, terimakasih atas bimbingan dan pelayanannya selama penulis menjadi mahasiswa;

7. Ibunda Setikah dan Ayahanda Marji yang telah membimbing dari kecil hingga dewasa terimakasih banyak atas segala kasih sayang, dukungan dan doa pastinya yang selalu Beliau panjatkan teruntuk anak-anaknya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik.
8. Kedua Saudara, Sun'an Zainudin dan Istiana terimakasih sudah menjadi pengingat dan penghibur disaat penulis mulai lelah akan segala tugas yang akan diselesaikan.
9. Trimakasih kepada keluarga besar yang selalu mendukung dan memberi dorongan akan kelulusan penulisan atas motivasinya.mbk ella, dek pinjal, dan keluarga besar (ibu karjuni)
10. Teman-teman KKN 24 UMD Kelurahan Blindungan, Bondowoso. Terima kasih untuk 45 harinya yang sangat berkesan.
11. Terimakasih kepada sahabat tercinta yang telah mengisi hari-hari dan membantu memberi dorongan akan kelulusan Penulis. Rizqi maulida zulianti, agustin dwi rahayu, dayat, angga, yeni, ulik dan yang lain terimakasih atas motivasinya;
12. Teman – Teman ilmu ekonomi studi pembangunan angkatan 2013 terima kasih yang telah memberikan dukungan dan doanya.
13. Teman – Teman Kos amanah terima kasih yang telah memberikan dukungan dan doanya.
14. Teman – Teman Ukm kesenian dan anggota luarbiasa ukm kesenian terima kasih yang telah memberikan dukungan dan doanya
15. Teman – Teman Fornasmala terima kasih yang telah memberikan dukungan dan doanya.
16. Teman – Teman Ikamala terima kasih yang telah memberikan dukungan dan doanya
17. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini, penulis menyadari atas kekurangan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan bagi penyempurnaan tugas akhir ini. Akhirnya,

penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan bagi penulisan karya tulis selanjutnya. Amin.

Jember, 29 Novemebr 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN PENGESAHAN.....	viii
ABSTRAK.....	ix
RINGKASAN.....	xi
PRAKATA.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Konsep Kesejahteraan Sosial Menurut Todaro.....	10
2.1.2 Konsep Tenaga Kerja menurut Maltus.....	13
2.1.3 Konsep Investasi Harro-Domar.....	15

2.2 Penelitian Terdahulu.....	20
2.3. Kerangka Konsep.....	27
2.4 Hipotesis.....	29
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	30
3.1. Jenis Penelitian.....	30
3.1.1 Jenis Penelitian.....	30
3.1.2 Unit Analisis.....	30
3.1.3 Jenis dan Sumber Data.....	30
3.2 Analisis Data.....	30
3.2.1 Analisis Regresi Linier Berganda.....	30
3.3 Asumsi Klasik.....	31
3.3.1 Uji Normalitas.....	31
3.3.2 Uji Multikolinieritas.....	32
3.3.3 Uji Heteroskedastisitas.....	32
3.4 Pengujian Hipotesis.....	33
3.4.1 Uji F (Uji Serentak).....	33
3.4.2 Uji t (Uji Parsial).....	34
3.4.3 Uji Koefisien Determinan (R^2).....	35
3.5 Definisi Operasional Variabel.....	36
BAB 4. PEMBAHASAN.....	38
4.1 Gambaran Umum.....	38
4.1.1 Keadaan Geografis Kabupaten Lamongan.....	38

4.2 Deskripsi Variabel Penelitian.....	39
4.2.1 Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Lamongan.....	39
4.2.2 Investasi Pemerintah.....	40
4.2.3 Investasi Swasta.....	41
4.3 Hasil Regresi.....	43
4.3.1 Analisis Regresi Linier Berganda.....	43
4.4 Uji asumsi.....	44
4.4.1 Uji Normalitas.....	45
4.4.2 Uji Multikolinieritas.....	45
4.4.3 Uji Heteroskedastisitas.....	46
4.5 Koefisien Determinan (uji R^2).....	47
4.6 Uji Hipotesis.....	48
4.6.1 Uji Simultan (uji F).....	48
4.6.2 Uji Parsial (uji t).....	49
4.7 Pembahasan	51
4.7.1 Pengaruh Penyerapan Tenaga Kerja (X1) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.....	51
4.7.2 Pengaruh Investasi Pemerintah (X2) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.....	52
4.7.3 Pengaruh Investasi Swasta (X3) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat....	53
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	54
5.2 Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	56

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1 Referensi Penelitian.....	20
2. Tabel 4.1 Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan.....	40
3. Tabel 4.2 Investasi Pemerintah.....	41
4. Tabel 4.3 Investasi Swasta.....	42
5. Tabel 4.4 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	43
6. Tabel 4.5 Kolmogorov smirnov.....	45
7. Tabel 4.6 Uji Multiolineritas.....	46
8. Tabel 4.7 Uji Heterokedastisitas.....	47
9. Tabel 4.8 Hasil Analisis Koefisien Determinasi Berganda.....	48
10. Tabel 4.9 Hasil Analisis Uji F.....	49
11. Tabel 4.10 Hasil Analisis Uji T.....	50

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1.1 Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2017.....	3
2. Gambar 2.1 Kerangka Konsep	28
3. Gambar 4.1 Hasil Uji Scatter Plot.....	44

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 Rekap data.....	57
2. Lampiran 2 Analisis Regresi Linier Berganda	58
3. Lampiran 3 Uji Asumsi Klasik	58
4. Lampiran 4 Uji Hipotesis.....	59

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang tidak terlepas dari masalah masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Masalah kesejahteraan masyarakat yang dihadapi oleh Indonesia adalah pesatnya angka kemiskinan dan pengangguran . Indonesia adalah merupakan satu dari banyak negara yang memiliki masalah mengenai kesejahteraan masyarakat. Masalah yang dimaksud adalah masalah mengenai tingginya jumlah kemiskinan, dimana kemiskinan merupakan masalah yang menghambat proses pembangunan. Masalah kesejahteraan masyarakat adalah masalah yang sangat luas dan kompleks. Masalah kemiskinan muncul sebagai imbas dari jumlah tenaga kerja yang tidak seimbang dengan jumlah permintaan lapangan pekerjaan yang tersedia. Kemiskinan yang jumlahnya bertambah terus menerus tentunya akan menambah beban perekonomian daerah dan mengurangi kesejahteraan rakyat. Program pembangunan nasional tidak lepas dari peran pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia di daerah masing-masing, sebagai upaya memperbesar kemampuan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dan serasi dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1997)

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah Kabupaten Lamongan adalah 1.812,8 km², atau menempati sekitar 3,73% luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Secara administratif, Kab. Lamongan terdiri dari 27 kecamatan, yang meliputi 462 Desa, 12 Kelurahan dan 1.431 Dusun. Dalam skenario pengembangan sistem

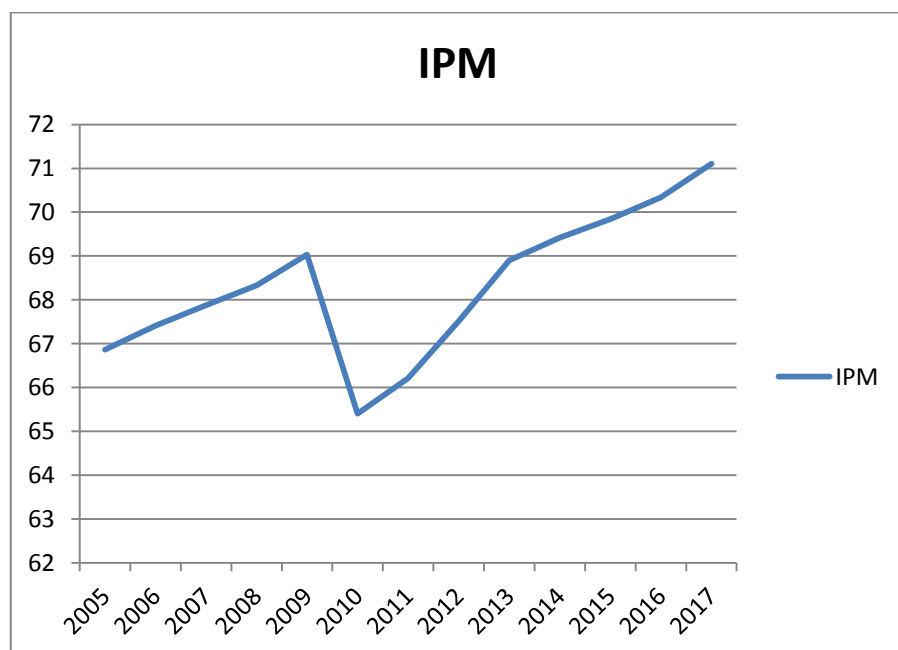
perwilayahan Jawa Timur, Kabupaten Lamongan termasuk Wilayah Pengembangan Germakertosusila Plus. Secara geografis, Kabupaten Lamongan memiliki letak yang sangat strategis, karena berada pada jalur Pantai Utara yang menghubungkan kabupaten/kota di wilayah Utara Jawa Timur.

Pembangunan di bidang ekonomi ditujukan untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan dengan tujuan akhir adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi memerlukan dukungan investasi, tenaga kerja dan inflasi yang juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kegiatan penanaman modal menghasilkan investasi yang akan terus menambah stok modal (capital stock). Selanjutnya peningkatan stok modal akan meningkatkan produktivitas serta kapasitas dan kualitas produksi, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Pembangunan ekonomi maupun pembangunan pada bidang lain akan selalu melibatkan sumber daya manusia sebagai salah satu pelaku pembangunan, oleh karena itu jumlah penduduk di dalam suatu negara adalah unsur utama dalam pembangunan. Jumlah penduduk yang besar tidak selalu menjamin keberhasilan pembangunan bahkan dapat menjadi beban bagi keberlangsungan pembangunan tersebut. Jumlah penduduk yang besar dan tidak sebanding dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang menyebabkan sebagian dari penduduk yang berada pada usia kerja tidak memperoleh pekerjaan. Menurut kaum klasik seperti Adam Smit, David Ricardo dan Thomas Robert Malthus, berpendapat bahwa akan selalu ada perlombaan antara tingkat output dan tingkat penduduk yang akhirnya dimenangkan oleh perkembangan penduduk, dikarenakan penduduk berfungsi sebagai tenaga kerja, maka akan terdapat kesulitan dalam menyediakan lapangan kerja, kalau penduduk dapat memperoleh pekerjaan maka akan dapat meningkatkan kesejahteraan bangsanya, tetapi jika tidak memperoleh pekerjaan berarti mereka akan menjadi pengangguran, dan akan menekan standar hidup bangsanya menjadi lebih rendah (Irawan dan Suparmoko. 2002).

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan bagi penduduk (*enlarging people choice*). Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur kesejahteraan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi pada tahun 2010. IPM dibentuk oleh tiga dimensi yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standard hidup layak. IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan dan indeks pengeluaran, penghitungan indeks yang dilakukan ini dengan melakukan standardisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks.

Gambar 1.1 Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Lamongan Tahun 2005 - 2017



(Sumber: BPS, Badan Pusat Statistik 2017 diolah)

Gambar 1.1 menyajikan data tentang pertumbuhan Indeks Pertumbuhan Manusia di Kabupaten Lamongan Tahun 2005 – 2017 data ini terus mengalami peningkatan. IPM tertinggi yaitu ditahun 2017 mencapai 71.11 persen sedangkan IPM terendah yaitu di Tahun 2005 mencabai 66,86 persen. Pada tahun 2017 indek pembangunan manusia di Kabupaten Lamongan berkategori “tinggi” naik dari kategori sebelumnya yaitu sedang dari tahun 2005 – 2017. Akan tetapi dengan IPM yang terus mengalami peningkatan. Akan tetapi dengan IPM yang terus mengalami peningkatan, di sisi lain angkatan kerja mengalami kondisi naik turun terutama di tingkat pengangguran yang semakin naik mengakibatkan kurangnya lowongan pekerjaan yang tidak sebanding dengan pencari kerja yang membuat pengangguran semakin banyak. Pada. Data pengangguran pada tahun 2005 mencapai 30,427 jiwa 2006 mencapai 61,969 jiwa. 2007 mencapai 41,004 jiwa 2008 mencapai 41,475 jiwa. 2009 mencapai 32,087 jiwa. 2010 mencapai 22,756 jiwa. 2011 mencapai 25, 984 jiwa 2012 mencapai 30,806 jiwa, dutahun 2013 mencapai 31,740 jiwa, pada tahun 2014 mencapai 26,310, pada tahun 2015 mencapai 25,952 jiwa, pada tahun 2016 turun mencapai 22,130, pada tahun 2017 mencapai 26,300, data menjelaskan angka pengangguran yang setiap tahunnya Mengalami naik turun, angka penganguran pada tahun 2005 melonjak naik dan pada tahun 2016 angka pengguran turun mencapai 22,130, akan tepai pada tahun 2017 tingkat pengangguran naik mencapai 26,300 persen, tingkat pengangguran mengalami kenaikan lagi setelah di tahun sebelumnya mengalami penurunan, maka dari itu kurannya lowongan pekerjaan yang membuat angka pengangguran bertamba, pendapatan masyarakat akan menurun, kesejahteraan sosial di Kabupaten Lamongan tidak stabil.

Pembangunan ekonomi yang baik akan meningkatkan produktivitas dan pendapatan, sehingga lapangan pekerjaan akan meningkat, makan kesempatan kerja akan terjamin. Pembangunan ekonomi yang tinggi akan mengurangi pengangguran dan kemiskinan yang semala ini menjadi masalah secara signifikan. Dengan meningkatkan produktivitas dan kreativitas penduduk, maka dapat menyerap dan mengelola sumber daya yang sangat penting bagi pertumbuhan

ekonomi, pendapatan per kapita berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat karena tingginya pendapatan akan mengurangi kemiskinan dan masyarakat yang tidak mendapat pekerjaan atau pengangguran sehingga tingkat kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat semakin meningkat, sehingga semakin tinggi pendapatan yang didapat oleh daerah maka semakin sejahtera penduduk yang berada pada suatu wilayah, dengan kata lain jumlah penduduk miskin akan berkurang (Sari. 2016)

Malthus menitik beratkan pada perkembangan kesejahteraan suatu negara bahwa pembangunan ekonomi yang dapat dicapai dengan meningkatkan kesejahteraan Negara yang bergantung pada kualitas penduduk yang dapat dihasilkan oleh tenaga kerjanya, dan sebagian lagi pada nilai hasil produk tersebut, tenaga kerja sebagai modal penggerak roda pembangunan. Jumlah tenaga kerja akan terus bertambah dan mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Disamping itu tenaga kerja merupakan penduduk dengan batas umur minimum 15 tahun dan tanpa batas maksimal, yang menjadi keterkaitan itu menyangkup tenaga kerja dengan pengusaha, pemerintah dan masyarakat (Irawan dan Suparmoko, 2002).

Pemerintah mengklaim telah telah berhasil dalam penyelenggaraan pembangunan yaitu terjadi pertumbuhan ekonomi, bertambahnya cadangan devisa, mengurangi penduduk miskin dan penyerapan tenaga kerja, pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin terwujudnya kesejahteraan sosial meskipun kebijakan ekonomi yang dirancang untuk meningkatkan pertumbuhan yang modernisasi dan tepat. Meskipun tercatat bahwa pertumbuhan ekonomi tinggi akan tetapi masalah kemiskinan dan ketertinggalan yang sangat besar tidak bisa dipecahkan dengan pertumbuhan ekonomi (Midgley dan Conly,2010). Disisi lain, pembangunan sosial merupakan bagian dari sistem pembangunan nasional, artinya pembangunan sosial ikut menyumbang data dan informasi terkait dengan tujuan pembangunan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut Midgley dan Conly (2010) menyatakan bahwa kebijakan pembangunan ekonomi perlu dikombinasikan dengan intervensi sosial. Tujuan dari

pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial mempunyai titik berat yang setara dalam proses pembangunan, didalam pembangunan ekonomi wajib memberikan manfaat kontribusi yang positif pada pembangunan ekonomi, sejalan dengan itu pembangunan sosial memberikan prioritas pada intervensi yang berorientasi dan senafas dengan tujuan-tujuan pembangunan secara luas.

Negara memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya melalui pembangunan. Menurut Adam Smith (Simarmata, 2008), tugas Negara ada 2 yaitu, pertama, Negara berkewajiban memberi rasa aman dari segala masalah apapun bentuknya bagi semua warganya, situasi yang tidak stabil baik secara sosial maupun politik, maka akan menyulitkan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan, kedua, Negara juga harus mendorong dan menciptakan kesejahteraan ekonomi bagi seluruh warganya. Hal tersebut menegaskan bahwa pembangunan diselenggarakan tidak semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi secara simultan juga berorientasi pada penciptaan kondisi sosial, artinya dimensi sosial dan ekonomi merupakan dua dimensi yang dapat digunakan sebagai titik masuk (*entry point*) untuk mengukur pembangunan negara.

Dalam sebuah pembangunan, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah hendaknya dijalin secara baik. Tidak hanya hubungan antara pusat dan daerah, namun sektor swasta juga dapat membantu pelaksanaan pembangunan sehingga hubungan antar pemerintah dan sektor swasta juga perlu terjalin dengan baik. Menurut Subandi (2008:133), pembangunan daerah adalah proses yang berjalan antara pemerintah daerah dengan masyarakat melalui pengelolaan potensi dan juga sumber daya yang dimiliki oleh setiap daerah, serta membangun kerjasama dengan sektor swasta sehingga mampu menstimulus perkembangan dari segi pelaksanaan kegiatan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah. Cooray (2009) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan tercipta apabila pemerintah daerah memiliki tata pemerintahan yang baik. Menurut Nugraeni (2011:4) pemerintah daerah akan menyesuaikan segala pengeluarannya dengan perubahan yang terjadi dalam penerimaan daerahnya. Pendapatan dan pengeluaran pemerintah memiliki hubungan yang

sangat penting terutama relevansinya terhadap suatu kebijakan yang akan diambil dan terkait dengan penggunaan anggaran (Liliana *et al.*,2011:241).

Perekonomian yang tumbuh dan berkembang tidak bisa lepas dari peran pemerintah melalui upaya-upaya yang direncanakan dan dilaksanakan dengan tujuan kesejahteraan masyarakat. Ikeji (2011) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah dapat dipicu dari terwujudnya desentralisasi fiskal. Menurut Bodman *et al.* (2009) Peningkatan atau penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan dampak dari pelimpahan tanggung jawab dari pemerintah pusat menjadi pemerintah daerah sebagai wujud terciptanya desentralisasi fiskal. Sedangkan menurut Zulyanto (2010) dalam Sudewi dan Wirathi (2013:137), menyebutkan bahwa desentralisasi fiskal yang dikenal dengan *money follow function* merupakan pemerintah daerah diberikan wewenang oleh pemerintah pusat tidak hanya mengatur dan mengurus wilayah, namun disertai pembagian wewenang pada sisi penerimaan pendanaan. Efisiensi sektor publik dapat tercipta dari adanya desentralisasi fiskal dimana melalui efisiensi tersebut dapat berdampak dalam jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi (Faridi, 2011). Hal serupa dikemukakan Vasquez (2001), yang menyatakan bahwa apabila desentralisasi fiskal mengutamakan pengeluaran publik, maka desentralisasi akan berdampak langsung terhadap PDRB yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Investasi yang tinggi di suatu daerah atau wilayah akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya kegiatan investasi yang dilakukan di suatu daerah akan menyebabkan penyerapan tenaga kerja semakin meningkat dan tingkat pengangguran akan semakin menurun karena masyarakat memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik kebutuhan sandang maupun pangan dan Inflasi merupakan indikator yang memiliki peran penting sebagai salah satu prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pengendalian terhadap fluktuasi inflasi dimana dengan pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil

memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Rannis, 2002)..

Kesejahteraan memang tidak dapat dilepaskan dari pertumbuhan ekonomi bahkan kapasitas ekonomi, seiring ditempatkan sebagai prasyarat utama dalam memajukan taraf hidup manusia. Pemahaman inilah yang seringkali membuat para perencana pembangunan mengabaikan dari hakikat pembangunan itu sendiri untuk mengingatkan bahwa hakikat dari pembangunan baru akan bermakna, manakala terjadi peningkatan martabat manusia yang mampu membebaskan dari persoalan-persoalan kemiskinan dan keterbatasan akses, inilah yang sesungguhnya menjadi inti dari pembangunan yaitu berfokus pada manusia untuk memulihkan dan meningkatkan martabat manusia. Pelaksanaan pembangunan di beberapa Negara dalam menciptakan tujuan untuk meningkatkan pembangunan manusia, terdapat beberapa hal yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah diantaranya pengalokasian anggaran secara tepat dan memadai dalam aspek kesehatan dan pendidikan serta pemerataan distribusi. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal-hal yang terkait kepentingan publik semestinya mendapat pengalokasian anggaran yang lebih besar oleh pemerintah daerah. Pelaksanaan pembangunan di beberapa Negara dalam menciptakan tujuan untuk meningkatkan pembangunan manusia, terdapat beberapa hal yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah diantaranya pengalokasian anggaran secara tepat dan memadai dalam aspek kesehatan dan pendidikan serta pemerataan distribusi. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal-hal yang terkait kepentingan publik semestinya mendapat pengalokasian anggaran yang lebih besar oleh pemerintah daerah.

Pentingnya kesejahteraan sosial yaitu untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan akibat terjadinya perubahan-perubahan sosial-ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial yang negatif akibat pembangunan, serta menciptakan kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tercapainya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan dari pembangunan ekonomi, yang memerlukan terciptanya kondisi-

kondisi dasar yaitu: 1) pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; 2) pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan; 3) penciptaan sektor ekonomi yang kokoh. Kesejahteraan masyarakat diharapkan akan terwujud apabila pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat maka menciptakan lapangan pekerjaan sehingga menyerap tenaga kerja lebih banyak pada tingkat upah yang layak. Fakta yang ditemukan adalah IPM secara kabupaten relatif tinggi, capaian IPM. akan tetapi tingkat pengangguran juga mengalami peningkatan pada beberapa tahun dan juga tingkat pengangguran terbuka maka kesejahteraan sosial tidak akan terwujud. Kondisi ini menimbulkan ketertarikan untuk melakukan studi mengenai “Pengaruh Penyerapan Tenaga Kerja, Investasi Pemerintah, Investasi Swasta dan Inflasi Terhadap Sosial Welfare di Kabupaten Lamongan Tahun 2012-2017”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah di jelaskan, maka rumusan masalah penelitian ini, yaitu

- a. Seberapa besar pengaruh Penyerapan Tenaga Kerja terhadap Sosial Welfare di kabupaten lamongan?
- b. Seberapa besar pengaruh Investasi Pemerintah terhadap Sosial Welfare di Kabupaten Lamongan?
- c. Seberapa besar pengaruh Investasi Swasta terhadap Sosial Welfare di Kabupaten Lamongan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Seberapa besar Pengaruh Tenaga Kerja terhadap Sosial Welfare di Kabupaten Lamongan
- b. Untuk mengetahui pengaruh Investasi Pemerinta terhadap Sosial Welfare di Kabupaten Lamongan
- c. Untuk mengetahui pengaruh Investasi Swasta terhadap Sosial Welfare di Kabupaten Lamongan

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka manfaat penelitian yang diharapkan adalah:

- a. Sembangan pemikiran dan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah kabupaten lamongan yang di harapkan dpat memperluas wawasan tentang pengaruh Penyerapan Tenaga Kerja, Investasi Pemerinta, Investasi Swasta dan Inflasi terhadap Sosial Walfre
- b. Bahan informasi yang dapat menjadi bacaan atau kepustakaan baik untuk penulis maupun pihak-pihak yang memerlukan sebagai refrensi mengenai Sosial Walfre

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konsep Kesejahteraan Sosial menurut Todaro

Todaro (2012) menyebutkan bahwa indikator kesejahteraan masyarakat di daerah diukur melalui tingkat kemiskinan, angka buta huruf, angka melek huruf, perusakan alam dan lingkungan, polusi air dan tingkat produk domestik bruto. Kesejahteraan suatu wilayah ditentukan dari ketersediaan sumber daya manusia, fisik, dan sumber daya lainnya. Sumberdaya tersebut berinteraksi dalam proses pembangunan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Selanjutnya Todaro menyebutkan kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah dapat ditandai oleh terentaskannya kemiskinan, tingkat kesehatan yang baik, perolehan tingkat pendidikan yang tinggi, dan peningkatan produktivitas masyarakat. Kajian yang dilakukan oleh Deaton (2003) menunjukkan bahwa distribusi pendapatan merupakan kewenangan dimiliki oleh pemerintah dan sangat berdampak pada tingkat kesejahteraan. Distribusi pendapatan yang tidak seimbang akan menciptakan ketimpangan, sehingga mengakibatkan sebagian masyarakat tidak dapat menjangkau kebutuhan dasar. Deaton juga menyebutkan bahwa kesejahteraan masyarakat diukur dengan tingkat pendapatan, pemenuhan kebutuhan dasar akan makanan dan kesehatan

Kesejahteraan sosial sebagai suatu sistem yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bermaksud untuk membantu individu-individu dan kelompok agar mencapai standar kehidupan dan kesejahteraan serta perorangan dan sosial yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan (Sukoco, 1991). Kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar contohnya sandang, pangan, papan, pendidikan dan perawatan atau kebutuhan sehari-hari

(Suharto, 2005). Berdasarkan definisi dan pengertian kesejahteraan sosial tersebut, maka setiap kegiatan pembangunan meliputi dua dimensi yaitu: 1) Dimensi ekonomi yang berkaitan dengan aspek material. 2) Kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan aspek spiritual dan sosial, hal ini menyatakan bahwa dua dimensi tersebut tidak bisa dipisahkan antara lain adalah dimensi ekonomi dan dimensi kesejahteraan sosial (Budiman,1996).

Pada Tahun 1990 UNDP (*United Nasional Development Program*) memperkenalkan konsep pembangunan manusia (*human Develoment*) sebagai paradikma baru model pembangunan menurut UNDP, pembangunan manusia sebagai suatu perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging the choice of people*) yang dapat dilihat sebagai proses upaya perluasan pilihan dan sekaligus sebagai taraf yang dicapai. Pada saat yang sama pembangunan manusia dapat juga dilihat sebagai pembangunan (*formation*) kemampuan manusia untuk perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan, dan keterampilan, sekaligus sebagai pemanfaatan (*utilization*) keterampilan mereka. Konsep pembangunan di atas jauh lebih luas pengertiannya di bandingkan dengan konsep pembangunan ekonomi yang menekankan pada pertumbuhan (*economic growth*), kebutuhan dasar, kesejahteraan masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia. Dari aspek ekonomi terdapat 3 konsep sebagai berikut:

1. Kesetaraan berfokus kepada kesamarataan dalam memperoleh sumberdaya ekonomi yang meliputi distribusi pendapatan dengan memperbaiki kebijakan fiscal dengan menata sistem kredit perbankan dan politik untuk menjamin hak dan keadilan dalam berpolitik.
2. Produktivitas yang berfokus untuk usaha meningkatkan kegiatan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, perlu juga didukung dengan meningkatnya investasi di bidang sumber daya manusia, finansial ekonomi masyarakat, investasi yang di fokuskan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia, dengan peningkatan ilmu pengetahuan dan keterampilan serta penguasaan teknologi dan informasi.
3. Pemberdayaan yaitu upaya untuk membangun kapasitas masyarakat menggunakan langkah untuk merubah pola pikir masyarakat kuno ke modern

dan peningkatan pertumbuhan pendapatan, melainkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan juga berupaya meningkatkan pola pikir untuk menemukan ide-ide atau gagasan baru untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. (Todaro,1998)

UNDP telah menerbitkan indikator ialah indeks pembangunan manusia (IPM) untuk mengukur pembangunan dan kesejahteraan suatu negara, IPM merupakan sebuah tolak ukur kesejahteraan suatu daerah atau Negara yang di lihat dari 3 aspek ialah: rata-rata lama sekolah, angka melek huruf dan angka harapan hidup, serta kemampuan daya beli. Dari angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah ini untuk mengukur suatu indeks pendidikan, angka harapan hidup bertujuan untuk mengukur indeks kesehatan, indikator daya beli untuk mengukur standar hidup masyarakat (Sari,2016). Undang-Undang No. 11 Tahun 2009, Kesejahteraan masyarakat. Menjelaskan ukuran tingkat kesejahteraan dapat dinilai dari kemampuan individu atau kelompok masyarakat dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya, kebutuhan material dapat di hubungkan dengan pendapatan yang nantinya akan mewujudkan kebutuhan sandang, pangan dan papan, dan kesehatan, untuk kebutuhan spiritual kita hubungkan dengan pendidikan, keamanan dan ketentraman hidup

Salah satu tujuan dari pembangunan adalah untuk mensejahterahkan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat untuk berbagi aspek dalam mewujudkan kehidupan yang lebih layak di waktu sekarang maupun yang akan datang, pembangunan perlu di pahami sebagai multidimensi yang mencakup perubahan orientasi dan organisasi dimana sistem sosial, ekonomi, kebudayaan dan politik. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, dimana kemakmuran berkaitan dengan aspek ekonomi, dan dapat diukur dengan tingkat produksi, pendapatan dan pengeluaran, sedangkan kesejahteraan ditentukan oleh aspek non ekonomi seperti pendidikan dan keamanan sebagai proses pembangunan, untuk menunjukan kesinambungan berbagai faktor yang dihasilkan, dalam kaitanya dengan data statistik untuk dapat melihat proses itu secara objektif. Memonitor dan mengevaluasi perkembangan serta merancang proses selanjutnya berdasarkan obyektif (Chow, 2011). Negara memiliki tanggung

jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan cara pembangunan. Menurut Adam Smith (Simarmata, 2008), tugas suatu Negara yang di maksudkan yaitu, pertama Negara berkewajiban untuk memberi rasa aman dari segala ancaman dalam bentuk apa pun bagi semua warganya. Situasi yang tidak stabil baik secara sosial maupun politik akan menyulitkan untuk mewujudkan kesejahteraan. Kedua Negara harus mendorong dan menciptakan kesejahteraan ekonomi bagi semua masyarakat. Pemikiran Adam Smith tersebut menegaskan bahwa pembangunan diselenggarakan tidak semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi secara simultan juga berorientasi pada penciptaan kondisi sosial.

2.1.2 Konsep Tenaga Kerja menurut Maltus

Teori Malthus berfokus pada perkembangan kesejahteraan suatu Negara, yaitu pembangunan ekonomi yang dapat dicapai dengan meningkatkan kesejahteraan suatu Negara yang bergantung pada kualitas penduduk yang dihasilkan oleh tenaga kerja, dan pada nilai produk tersebut. Tenaga kerja sebagai modal penggerak roda pembangunan yang jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan, seiring berlangsungnya proses demografi. Tenaga kerja merupakan penduduk dengan batas usia 15 tahun tanpa batas maksimum. Pembangunan tenaga kerja mempunyai banyak dimensi dan saling berkaitan. Keterkaitan tersebut menyangkup tenaga kerja sebagai pengusaha, pemerintah, dan masyarakat (Irawan dan Suparmoko, 2002)

Penyediaan lapangan kerja merupakan salah satu tujuan pembangunan ekonomi, terutama di Indonesia, dimana pertumbuhan angkatan kerja lebih besar dibandingkan pertumbuhan kesempatan kerja. Pembangunan ekonomi yang semakin meningkat dan membaik akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sehingga mempengaruhi ketersediaan tenaga kerja disuatu daerah. Ada dua faktor yang mempengaruhi keadaan ketenaga kerjaan yaitu faktor permintaan (dipengaruhi oleh dinamika pembangunan ekonomi) dan faktor penawaran (di tentukan oleh perusahaan struktur penduduk). Ada perbedaan antara permintaan

tenaga kerja dan jumlah tenaga kerja yang diminta atau dalam hal ini tenaga kerja yang diserap oleh perusahaan atau suatu sektor. Permintaan tenaga kerja adalah keseluruhan hubungan antara berbagai tingkat upah dan jumlah orang yang diminta untuk dipekerjakan. Sedangkan jumlah tenaga kerja yang diminta lebih ditujukan kepada kuantitas atau banyaknya permintaan tenaga kerja pada tingkat upah tertentu (Tri Wahyu R, 2004).

Tenaga kerja adalah penduduk yang dapat memproduksi barang dan jasa, jika ada permintaan terhadap tenaga kerja dan mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut, Payaman J Simanjutak (1985) dalam bukunya sumber daya manusia, tenaga kerja (*man power*) adalah penduduk yang sudah bekerja dan sedang bekerja, yang mencari pekerjaan, dan sedang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga, orang tersebut dapat dikatakan sebagai angkatan kerja kecuali mereka yang tidak melakukan aktifitas. Permasalahan pokok dalam pengembangan kebijakan ketenagakerjaan adalah prestasi *full employment* dan perbaikan struktur hidup masyarakat, disisi lain kebijakan ekonomi dimaksud untuk membantu dalam menentukan jumlah permintaan tenaga kerja, sementara kebijakan makro ekonomi menentukan tingkat jumlah kesempatan kerja, maka kebijakan ketenagakerjaan dapat menambah efektifitas penggunaan kebijakan fiskal. Program-program ketenagakerjaan jika digunakan bersama dengan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter dan anggaran belanja dengan menyediakan secara tepat sumberdaya untuk kesempatan kerja yang maksimum maupun untuk menyelesaikan masalah struktur. Program-program ketenagakerjaan jika digunakan bersamaan dengan kebijakan fiskal dan moneter maka dapat mengurangi masalah pada struktur yang bercirikan pengangguran yang tinggi (Basir,2004)

Dalam ilmu ekonomi seperti kita ketahui faktor-faktor produksi yang terdiri dari: tanah, modal, tenaga kerja, skill. Salah satu faktor tersebut adalah tenaga kerjayang sesuai dengan keahlian dan ketrampilan yang dimiliki agar tenaga kerja yang dimiliki dalam sektor industri, modal utama yang dibutuhkan adalah sumber daya manusia. Banyak tenaga kerja yang tersedia tetapi tidak dapat diserap oleh industri hal ini dikarenakan keahlian tenaga kerja tidak sesuai dengan

yang dibutuhkan oleh industri, di sinilah perlunya peranan pemerintah untuk melakukan pendidikan atau pelatihan terhadap tenaga kerja agar memiliki skill yang dibutuhkan oleh industri. Mengingat kesempatan kerja yang terbatas tersebut maka pemerintah mengupayakan penciptaan lapangan kerja yang nantinya dapat menampung maupun mengurangi tingkat pengangguran yang berada di tengah masyarakat melalui penciptaan usaha usaha industri kecil. Semakin bertambahnya jumlah industri kecil akan membawa dampak sangat luas terhadap penyerapan tenaga kerja, peningkatan SDM yang terbatas tentunya akan menghambat pengembangan itu sendiri, merupakan tugas dan tanggung jawab masyarakat secara bersama sama dengan pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan serta berpartisipasi menunjang program pemerintah pada peningkatan taraf hidup yang lebih adil dan merata, lalu pemerintah memberikan bantuan dan

Penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk bekerja, penduduk yang bekerja terserap dan tersebar di berbagai sektor perekonomian. Terserapnya penduduk yang bekerja sebabkan adanya permintaan tenaga kerja. Menurut handoko (Ridha, 2011;10) penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal, antara lain tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, pengangguran dan tingkat bunga, sedangkan tingkat internal dipengaruhi oleh tingkat upah, produktivitas tenaga kerja, modal dan pengeluaran non upah.

Jadi yang dimaksud dengan penyerapan tenaga kerja dalam penelitian ini adalah jumlah atau banyaknya orang yang bekerja di berbagai sektor perekonomian. Tenaga kerja di Indonesia lebih banyak terserap pada sektor informal. Sektor informal akan menjadi pilihan utama pencari kerja karena sektor formal sangat minim menyerap tenaga kerja. Sektor formal biasanya membutuhkan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang tinggi.

2.1.3 Konsep Investasi Harro-Domar

Teori Harrod-Domard menyimpulkan bahwa investasi memiliki pengaruh ganda untuk jangka panjang (*long-term*). Pada satu sisi, investasi berpengaruh

terhadap perkembangan produksi nasional suatu negara karena tersedianya stok modal yang menjadi faktor penting kelangsungan dunia usaha. Di sisi lain, investasi berpengaruh pada permintaan agregat. Oleh karena itu, untuk mencapai *steady-state growth* atau pertumbuhan ekonomi yang mantap diperlukan kondisi di mana para pelaku usahanya memiliki harapan dan pandangan yang cenderung stabil. Investasi juga sebagai sarana dan motivasi dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi khususnya dalam upaya memperluas penggunaan tenaga kerja dalam meningkatkan produksi. Kaum aliran klasik menganggap akumulasi kapital sebagai suatu syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi. Adanya pembangunan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan. Jadi secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa dengan melakukan penanaman modal maka dapat meningkatkan pendapatan. Sebagian ahli ekonomi memandang pembentukan investasi merupakan salah satu faktor penting yang memainkan peran vital terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara. Ketika pengusaha atau individu atau pemerintah melakukan investasi, maka akan ada sejumlah modal yang ditanam, ada sejumlah pembelian barang modal (yang tidak dikonsumsi), tetapi digunakan untuk produksi, sehingga dapat memacu produktivitas untuk menghasilkan barang dan jasa. Di sisi lain, perekonomian negara yang lesu sangat dihindari bagi para perencana negara. Untuk itulah formulasi kebijakan ekonomi yang pro investasi didorong untuk terus meningkat guna mengatasi masalah stagnasi atau kelesuan ekonomi agar pertumbuhan ekonomi terus membaik. Meningkatnya investasi akan menjamin kontinuitas pembangunan ekonomi, menyerap tenaga kerja dan menekan kemiskinan, sehingga terdapat perbaikan tingkat kesejahteraan rakyat secara keseluruhan dan merata.

Teori ekonomi mendefinisikan investasi sebagai pengeluaran pemerintah untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa yang akan datang. Investasi adalah suatu komponen dari $PDB = C + I + G + (X - M)$. Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya

berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang (Sunariyah, 2003:4).

Secara umum investasi meliputi penambahan barang barang dan jasa dalam masyarakat seperti penambahan mesin mesin baru, pembuatan jalan baru, pembukaan tanah baru, dan sebagainya. Investasi adalah pengeluaran untuk membeli barang modal dan peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti atau menambah barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan, dengan perkataan lain investasi adalah kegiatan perbelanjaan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam perekonomian (Sukirno, 2000). Investasi merupakan pengeluaran perusahaan secara keseluruhan yang mencakup pengeluaran untuk membeli bahan baku atau material, mesin-mesin dan peralatan pabrik serta semua modal lain yang diperlukan dalam proses produksi, pengeluaran untuk keperluan bangunan kantor, bangunan tempat tinggal karyawan dan bangunan konstruksi lainnya juga perubahan nilai stok atau barang cadangan sebagai akibat dari perubahan jumlah dan harga (Tambunan, 2001). Dari beberapa pendapat di atas tentang investasi, maka dapat diketahui investasi merupakan suatu pengeluaran sejumlah dana dari investor atau pengusaha guna membiayai kegiatan produksi untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang.

Berdasarkan jenisnya investasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu: Pertama investasi pemerintah, adalah investasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada umumnya investasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; Kedua investasi swasta, adalah investasi yang dilakukan oleh sektor swasta nasional yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ataupun investasi yang dilakukan oleh swasta asing atau disebut Penanaman Modal Asing (PMA). Investasi yang dilakukan swasta bertujuan untuk mencari keuntungan dan memperoleh pendapatan serta didorong oleh adanya pertambahan pendapatan. Jika pendapatan bertambah konsumsipun bertambah dan bertambah pula *effective demand*. Investasi timbul diakibatkan oleh bertambahnya permintaan yang sumbernya terletak pada penambahan pendapatan disebut *induced investment*. Dana investasi

swasta menurut asalnya terdiri dari dua 2 macam, yaitu: PMA (Penanaman Modal Asing), jenis investasi yang sumber modalnya berasal dari luar negeri, sedangkan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) ialah jenis investasi yang sumber modalnya berasal dari dalam negeri.

Penanaman Modal Asing (PMA) adalah salah satu upaya untuk meningkatkan jumlah modal untuk pembangunan ekonomi yang bersumber dari luar negeri. Salvatore (1997) menjelaskan bahwa PMA terdiri atas:

1. Investasi portofolio (*portfolio investment*), yakni investasi yang melibatkan hanya aset-aset finansial saja, seperti obligasi dan saham, yang didenominasikan atau ternilai dalam mata uang nasional. Kegiatan-kegiatan investasi portofolio atau finansial ini biasanya berlangsung melalui lembaga-lembaga keuangan seperti bank, perusahaan dana investasi, yayasan pensiun, dan sebagainya.
2. Investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*), merupakan PMA yang meliputi investasi ke dalam aset-aset secara nyata berupa pembangunan pabrik-pabrik, pengadaan berbagai macam barang modal, pembelian tanah untuk keperluan produksi, dan sebagainya. Wiranata (2004) berpendapat bahwa investasi asing secara langsung dapat dianggap sebagai salah satu sumber modal pembangunan ekonomi yang penting, semua Negara yang menganut system ekonomi terbuka pada umumnya akan memerlukan investasi asing. Terutama pada perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa untuk kepentingan ekspor. Di Negara maju seperti Amerika, modal asing (khususnya dari Jepang dan Eropa Barat) tetap dibutuhkan guna memacu pertumbuhan ekonomi domestik, menghindari kelesuan pasar dan penciptaan kesempatan kerja. Apalagi di negara berkembang seperti Indonesia, modal asing sangat diperlukan terutama sebagai akibat dari modal dalam negeri yang tidak mencukupi. Untuk itu berbagai kebijakan di bidang penanaman modal perlu diciptakan dalam upaya menarik pihak luar negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Dalam upaya untuk menarik minat investor asing menanamkan modalnya di Indonesia, pemerintah terus meningkatkan kegiatan promosi, baik melalui pengiriman utusan ke luar negeri maupun peningkatan kerjasama antara pihak swasta nasional dengan swasta asing. Sementara itu, Badan Koordinasi

Penanaman Modal (BKPM) sebagai badan yang bertanggung jawab dalam kegiatan penanaman modal terus mengembangkan perannya dalam menumbuhkan investasi. Masuknya PMA di Indonesia diatur oleh pemerintah dalam UU No 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing dan dilengkapi serta disempurnakan oleh UU No 11 Tahun 1970 juga tentang penanaman modal asing. UU itu didukung oleh berbagai kemudahan yang dilengkapi dengan berbagai kebijakan dalam paket-paket deregulasi. Hal ini dimaksudkan untuk lebih menarik investasi didalam memenuhi kebutuhan sumber-sumber pembiayaan pembangunan. Sementara itu, rencana PMA yang disetujui pemerintah adalah nilai investasi proyek baru, perluasan, dan alih status, yang terdiri atas saham peserta Indonesia. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah bentuk upaya menambah modal untuk pembangunan melalui investor dalam negeri. Modal dari dalam negeri ini bisa didapat baik itu dari pihak swasta ataupun dari pemerintah. Kebijakan tentang rencana PMDN ditetapkan oleh pemerintah melalui UU No 6 Tahun 1968, kemudian disempurnakan dengan diberlakukannya UU No. 12 Tahun 1970. Rencana PMDN yang disetujui pemerintah adalah nilai investasi baru, perluasan, dan alih status, yang terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman. Jumlah kumulatif rencana PMDN adalah jumlah seluruh rencana PMDN yang disetujui pemerintah sejak tahun 1968 dengan memperhitungkan pembatalan, perluasan, perubahan, penggabungan, pencabutan, dan pengalihan status dari PMDN ke PMA atau sebaliknya.

Investasi Menurut Sukirno (1994: 107) dalam buku pengantar ekonomi makro mengartikan investasi ialah pengeluaran modal perusahaan guna mengadakan jasa atau barang dan berbagai perlengkapan produksi yang dapat meningkatkan kemampuan produksi barang ataupun jasa didalam perekonomian. Dan investasi juga tidak hanya untuk memaksimalkan hasil (*output*) namun juga menentukan. peningkatan jumlah tenaga kerja, pendapatan dan peningkatan kualitas teknologi. Sedangkan Harrod dan Dommar mengumpamakan sebuah investasi sebagai kunci yang berperan ganda terhadap proses pertumbuhan ekonomi, beberapa investasi yaitu: pertama, investasi berperan ganda yang mampu mewujudkan peran laju pendapatan dan kedua

investasi berperan membesarkan kuantitas produksi dalam perekonomian dengan jumlah stok modal ditingkatkan (Jhingan, 2004: 229).

Investasi Pemerintah Teori dasarnya secara langsung atau tidak investasi pemerintah dapat mendorong investasi swasta. Seperti dalam penelitian Aschauser (1989) menyangkut kausalitas modal publik dan modal swasta. Penumpukan modal publik yang tinggi akan berpengaruh pada peningkatan pertumbuhan investasi negara dan tercapainya suatu keadaan *crowding out* yang berimbas pada investasi swasta. Tingkat *output* yang mengalami peningkatan akan memberikan imbas pada investasi swasta, hal tersebut pastinya campur tangan pemerintah dalam berinvestasi (Verma, 2005).

Investasi Swasta Investasi sektor swasta merupakan investasi yang dilakukan bersumber pada pihak swasta nasional, masyarakat, perusahaan atau lembaga dengan harapan memperoleh profit dan pendapatan serta didorong adanya perbesaran pendapatan. *Effecive demand* dikatankan apabila diikuti bertambahnya pendapatan bertambah yang membuat konsumsi juga bertambah. Investasi swasta pada umumnya diperuntukan bagi usaha-usaha yang bisa mengembangkan perekonomian. Investasi tersebut dilakukan secara langsung melalui pembelian obligasi, surat berharga dalam jangka panjang sekurang kurangnya satu tahun.

2.2 Penelitian Terdahulu

Studi mengenai penyerapan tenaga kerja, telah dilakukan oleh banyak peneliti. Setelah sebelumnya dijabarkan mengenai hubungan teoritis terkait masalah yang akan diteliti. Berikut adalah rincian mengenai penelitian-penelitian sejenis yang dijadikan referensi dalam penelitian ini (Tabel.2.1)

Tabel 2.1 Referensi Penelitian

No		Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil
1	Swandika. (2018)	Pengaruh pendapatan asli daerah dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran	Pendapatan asli daerah, investasi , pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran .	Analisis jalur (<i>panth analysis</i>)	Hasil analisis data menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran. Dimana investasi ber pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran. Pertumbuhan ekonomi

					merupakan variabel mediasi positif dalam pendapatan asli daerah terhadap tingkat pengangguran.
2	Rini. (2012)	Pengaruh Investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia	Variabel independen: Investasi, penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi Variabel dependen: Kesejahteraan social	Spss (statistica I prochict and Service solutions)	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat Investasi berpengaruh tidak signifikan dan mempunyai hubungan yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap kesejahteraan

					masyarakat Penyerapan tenaga kerja berpengaruh tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
3	Rustiono. (2008)	Analisis pengaruh investasi, tenaga kerja, dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Tengah	Variabel independen: Pertumbuhan ekonomi, Jawa Tengah Variabel dependen: Investasi swasta, angkatan kerja, belanja pemerintah daerah, krisis ekonomi.	Analisis regresi, OLS (<i>ordinary least squar</i>)	Angkatan kerja, investasi swasta (PMA dan PMDM) dan belanja pemerintah daerah memberi dampak positif terhadap perkembangan PDRB provinsi Jawa Tengah. Krisis ekonomi menyebabkan perbedaan yang nyata dimana

					kondisi antara sebelum dan sesudah krisis memberi arah yang negatif.
4.	Khakim (2011)	Potensi fiscal terhadap pertumbuhan ekonomi dan keseimbangan masyarakat	Kesejahteraan masyarakat, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, pendapatan lainnya yang sah, PDRB.	Regresi data panel	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negative terhadap keseimbangan masyarakat, pad berpengaruh positif terhadap keseimbangan masyarakat, dan berpengaruh positif terhadap keseimbangan masyarakat.
5.	Fatihudin (2011)	Pengaruh Investasi Swasta dan	Variabel. Investasi Swasta,	Spss (statistical prociect	Hasil dari penelitian: Pertama,

		<p>Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Public Kabupaten/Kot a di Provinsi Jawa Timur.</p>	<p>Investasi Pemerinta, Pertumbuhan ekonomi, Pembangunan ekonomi, tenaga kerja dan kesejahteraan sosial.</p>	<p>and Service solutions)</p>	<p>investasi swasta memiliki efek positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kedua, investasi swasta juga memiliki efek signifikan positif pada penyerapan tenaga kerja. Ketiga, investasi pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Keempat, investasi pemerintah tidak berpengaruh dan tidak berpengaruh signifikan terhadap</p>
--	--	--	--	-------------------------------	---

					<p>penyerapan tenaga kerja. Kelima, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Keenam, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Ketujuh, penyerapan tenaga kerja tidak berpengaruh dan tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.</p>
--	--	--	--	--	---

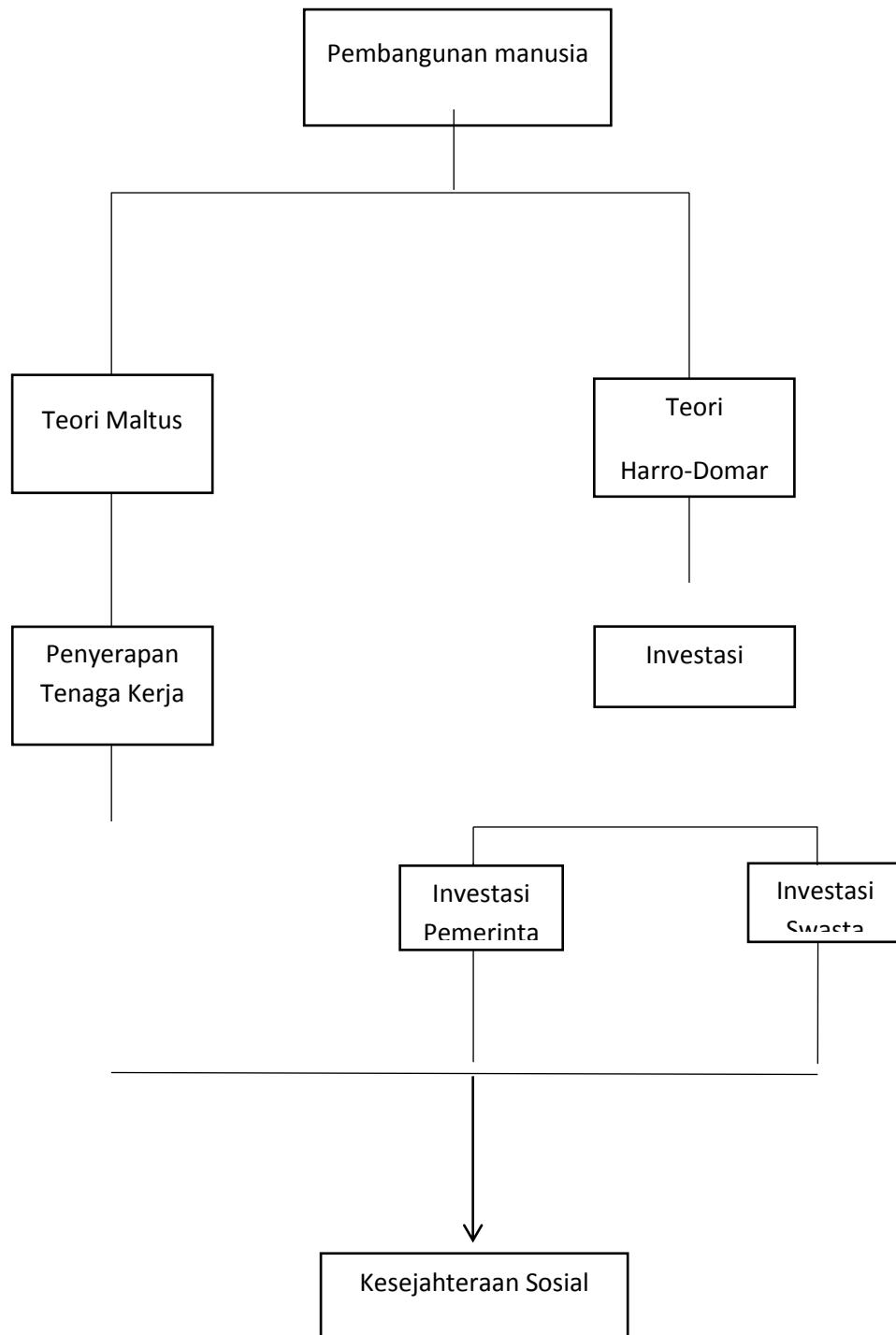
6	Banbang. (2013)	Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Keajahteraan masyarakat	Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, Kesejahteraan Masyarakat.	Struktural Equation Modeling (SEM)	Hasil penelitian mengindikasikan bahwa, pertama, desentralisasi fiskal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kedua, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Ketiga, desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
7	Effendie	<i>The Effect of</i>	belanja	regresi	Hasil statistik

	(2015)	<i>Government Capital Expenditure and Private Investment on Social Welfare</i>	modal, investasi swasta, ouput, penggunaan tenaga kerja, kesejahteraan sosial	OLS, data panel	menunjukkan bahwa semua hubungan memiliki pengaruh yang signifikan. Pribadi investasi lebih berpengaruh pada kesejahteraan sosial daripada pengeluaran modal pemerintah. Ada dua Temuan empiris dari penelitian ini: Temuan pertama, ada efek substitusi antara investasi swasta dan tenaga kerja penggunaan, lebih banyak investasi swasta, lebih sedikit penggunaan tenaga kerja. Di sisi lain, ada
--	--------	--	---	-----------------	---

					<p>efek keluaran antara keluaran dan penggunaan tenaga kerja, lebih banyak output lebih banyak penggunaan tenaga kerja. Efek total dari investasi swasta terhadap penggunaan tenaga kerja adalah positif. Kedua menemukan, penggunaan tenaga kerja memiliki hubungan negatif dengan kesejahteraan sosial, penggunaan tenaga kerja yang lebih tinggi, kesejahteraan sosial yang lebih rendah.</p>
--	--	--	--	--	--

2.3 Kerangka Konsep

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, terdapat variabel yang digunakan dalam penelitian ini, maka akan menjelaskan factor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat kabupaten lamongan. Dengan variabel independen PDRB kab lamongan, investasi dan tingkat pengangguran terbuka maka kerangka konsep atau pemikiran dalam penelitian ini dapat di gambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konsep

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan-pertanyaan atas suatu dugaan atau anggapan yang mungkin benar dan salah, yang harus di buktikan keberadaanya. Adapun hipotesis yang bias penulis kemukakak keberadaanya berdasarkan latar belakang, teori dan peneliti sebelumnya yaitu sebagai berikut:

1. Penyerapan tenaga kerja berpengaruh positif terhadap *Social Welfare* di Kabupaten Lamongan.
2. Investasi Pemerinta berpengaruh positif dan terhadap *Social Welfare* di Kabupaten Lamongan.

Investasi Swasta berpengaruh positif dan terhadap *Social Welfare* di Kabupaten Lamongan

BAB 4

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Keadaan Geografi Kabupaten Lamongan

Secara geografis Kabupaten Lamongan terletak pada 651'54" - 723'06" Lintang Selatan dan 11233'45" - 11233'45" Bujur Timur. Kabupaten Lamongan memiliki luas wilayah kurang lebih 1.812,8 km² atau +3.78% dari luas wilayah Propinsi Jawa Timur. Dengan panjang garis pantai sepanjang 47 km, maka wilayah perairan laut Kabupaten Lamongan adalah seluas 902,4 km², apabila dihitung 12 mil dari permukaan laut.

Daratan Kabupaten Lamongan dibelah oleh Sungai Bengawan Solo, dan secara garis besar daratannya dibedakan menjadi 3 karakteristik yaitu:

1. Bagian Tengah Selatan merupakan daratan rendah yang relatif agak subur yang membentang dari Kecamatan Kedungpring, Babat, Sukodadi, Pucuk, Lamongan, Deket, Tikung, Sugio, Maduran, Sarirejo dan Kembangbahu.
2. Bagian Selatan dan Utara merupakan pegunungan kapur berbatu-batu dengankesuburan sedang. Kawasan ini terdiri dari Kecamatan Mantup, Sambeng, Ngimbang, Bluluk, Sukorame, Modo, Brondong, Paciran, dan Solokuro.
3. Bagian Tengah Utara merupakan daerah Bonorowo yang merupakan daerah rawan banjir. Kawasan ini meliputi kecamatan Sekaran, Laren, Karanggeneng, Kalitengah, Turi, Karangbinangun, Glagah.

Batas wilayah administratif Kabupaten Lamongan adalah: Sebelah Utara perbatasan dengan laut jawa, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gresik, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto, sebelah barat berbatasan dengan Kabupten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban.

Kondisi topografi Kabupaten Lamongan dapat ditinjau dari ketinggian wilayah di atas permukaan laut dan kelerengan lahan. Kabupaten Lamongan terdiri dari daratan rendah dan bonorowo dengan tingkat ketinggian 0-25 meter seluas 50,17%, sedangkan ketinggian 25-100 meter seluas 45,68%, selebihnya 4,15% berketinggian di atas 100 meter di atas permukaan air laut. Jika dilihat dari tingkat kemiringan tanahnya, wilayah Kabupaten Lamongan merupakan wilayah yang relatif datar, karena hampir 72,5% lahannya adalah datar atau dengan tingkat kemiringan 0-2% yang tersebar di kecamatan Lamongan, Deket, Turi, Sekaran, Tikung, Pucuk, Sukodadi, Babat, Kalitengah, Karanggeneng, Glagah, Karangbinangun, Mantup, Sugio, Kedongpring, Sebagian Bluluk, Modo, dan Sambeng, sedangkan hanya sebagian kecil dari wilayahnya adalah sangat curam, atau kurang dari 1% (0,16%) yang mempunyai tingkat kemiringan lahan 40% lebih.

Kondisi tata guna tanah di Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut: baku sawah (PU) 44.08 Hektar, Baku sawah tidak resmi (Non PU) 8.168,56 Hektar, sawah tadah hujan 25.407,80 Hektar, Tegalan 32.844,33 Hektar, pemukiman 12.418,89 Hektar, Tambak / kolam / waduk 3.497,72 Hektar, kawasan hutan 32.224,00 Hektar, kebun Campuran 212,00 Hektar, Rawa 1.340,00 Hektar, Tanah tandus / kritis 889,00 Hektar dan lain-lain 15.092,51 Hektar.

4.2 Deskripsi variabel Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyerapan tenaga kerja, investasi pemerintah, investasi swasta, yang mempengaruhi sosial welfare di Kabupaten Lamongan, adapun faktor – faktor yang mempengaruhi penelitian ini adalah penyerapan tenaga kerja, investasi pemerintah, dan Investasi swasta terhadap social welfare di Kabupaten Lamongan tahun 2005-2017

4.2.1 Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Lamongan

Masalah ketenagakerjaan bukan sekedar keterbatasan lapangan pekerjaan namun mengarah pada penyebab perbedaan yang kebanyakan permasalahan

ketenagakerjaan muncul akibat kegagalan dari pencipta lapangan pekerjaan atau kurangnya lapangan pekerjaan yang tidak seimbang dengan banyaknya jumlah angkatan kerja yang banyak akibat pertumbuhan penduduk semakin tinggi, dalam hal ini tenaga kerja yang terserap sedikit sehingga muncul masalah pengangguran, pasar tenaga kerja pada dasarnya hubungan antara penawaran dan permintaan,

Tabel 4.1

Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan

no	tahun	penyerapan tenaga kerja
1	2005	30,673
2	2006	32,185
3	2007	31,280
4	2008	27,981
5	2009	29,415
6	2010	35,488
7	2011	30,885
8	2012	31,885
9	2013	32,387
10	2014	42,387
11	2015	46,744
12	2016	48,319
13	2017	50,893

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lamongan 2005-2017

Tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2012-2017 jumlah penduduk yang bekerja mengalami peningkatan dari 30.823 jiwa sedangkan pada tahun 2017

mengalami peningkatan 50.893 jiwa, dari hasil data tersebut penyerahan tenaga kerja mengalami peningkatan keadaan ini menggambarkan gairah pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Lamongan

4.2.2 Investasi Pemerintah

Dari sampel yang di teliti maka di peroleh data investasi pemerintah di Kabupaten Lamongan dari tahun 2005-2017 dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.2

Investasi Pemerintah

No	Tahun	Unit Usaha	Milyar
1	2005	13	136.800.000
2	2006	6	34.900.000
3	2007	5	7.974.600.000
4	2008	17	694.990.000
5	2009	15	501.396.336
6	2010	15	1.463.213.851
7	2011	18	3.043.627.755
8	2012	1 038	2.780.872.257
9	2013	895	206.385. 280
10	2014	912	973.400,41
11	2015	1 251	394.410.153
12	2016	1 385	313.534.188
13	2017	1 543	6.530.291

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lamongan 2005-2017

Investasi merupakan suatu kegiatan dalam menanamkan modal usaha untuk melakukan kegiatan perekonomian di Negara Indonesia. Kegiatan investasi merupakan awal dari kegiatan pembangunan perekonomian di suatu Negara, disinilah penanaman modal memiliki peranan penting sebagai sumber dana alternatif yang digunakan untuk proses pembangunan terutama di kabupaten Lamongan, nilai investasi pemerintah mengalami peningkatan dari tahun 2005-2017, dalam hal ini kabupaten Lamongan masih mempunyai nilai investasi yang sangat tinggi, melalui penanaman modal atau investasi pemerintah ini bisa menyerap lapangan pekerjaan di kabupaten Lamongan, sehingga banyak investor-investor untuk penanaman modal, sehingga mengurangi angka pengangguran di kabupaten Lamongan.

4.2.3 Investasi Swasta

Investasi memiliki peran penting dalam menciptakan kesempatan kerja. Peningkatan jumlah investasi baik investasi swasta akan mempengaruhi perluasan kesempatan kerja di suatu daerah.

Tabel 4.3

Investasi Swasta

No	Tahun	Unit Usaha	Milyar
1	2005	37,129	363.550.537,75
2	2006	13,621	304.820.845,00
3	2007	345	354.811.456,46
4	2008	1,051	783.556.816,00
5	2009	1,109	298.161.587,54
6	2010	1,127	487.228.131,75
7	2011	969	821.656.138,01
8	2012	1 020	837.893.280,10
9	2013	874	767.015.127,50
10	2014	882	1.180.197.626,85
11	2015	1 186	822.323.217,14
12	2016	1 319	820.037 .876.48
13	2017	1 522	82003787648

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lamongan 2005-2017

Menurut data investasi swasta di Kabupaten Lamongan diketahui mengalami perkembangan, di samping peran investasi swasta sebagai usaha yang dilakukan pemerintah baik di pusat maupun di daerah untuk memperoleh dana pembangunan, peran serta pelaku ekonom dari dalam negeri yang berparti sipasi dalam pembangunan, maka investasi swasta juga memiliki peran penting dalam menunjang pembangunan perekonomian di Kabupaten Lamongan, data bps investasi swasta mengalami peningkatan yang sangat inggi pada tahun 2014

sebesar 1.179.951.906, penanaman modal yang sangat besar untuk perkembangan di kabupaten Lamongan.

4.3 Hasil Regresi

4.3.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4.4

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.143	2.168		-.066	.949
penyerapan tenaga kerja	.695	.214	1.216	3.252	.010
investasi pemerintah	-.002	.030	-.018	-.073	.944
investasi swasta	.090	.030	1.171	3.052	.014

Berdasarkan regresi yang diperoleh dari pengujian tersebut adalah :

$$Y = 0,143 + 0,695X_1 + 0,002X_2 + 0,090X_3 + e$$

Dari persamaan regresi linier berganda dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta dalam persamaan regresi tersebut adalah 0,143. Artinya jika jumlah Penyerapan Tenaga Kerja (X1), Investasi Pemerintah (X2) dan Investasi Swasta (X3) bernilai 0, maka Sosial Welfare (Y) sebesar 0,143.
2. Nilai koefisien regresi variabel Penyerapan Tenaga Kerja (X1) sebesar 0,695.

Artinya jika terjadi peningkatan variabel Penyerapan Tenaga Kerja (x_1), maka nilai variabel Sosial Welfare (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,695.

3. Nilai koefisien regresi variabel Investasi Pemerintah (X_2) sebesar 0,002. Artinya jika terjadi peningkatan variabel Investasi Pemerintah (X_2), maka nilai variabel Sosial Welfare (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,002.
4. Nilai koefisien regresi variabel Investasi Swasta (X_3) sebesar 0,090. Artinya jika terjadi peningkatan variabel Investasi Swasta (X_3), maka nilai variabel Sosial Welfare (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,090.

4.4 Uji Asumsi

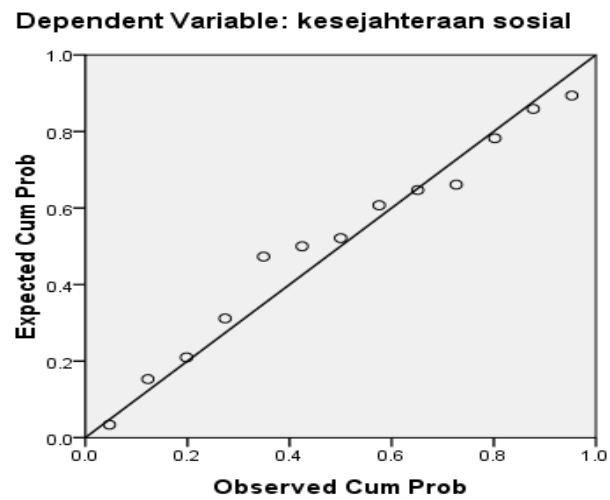
4.4.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data yang digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel (variabel terikat dan bebas) berdistribusi normal atau tidak, Untuk menganalisis suatu model regresi yang bebas normalitas yaitu dengan melihat penyebaran data (titik-titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Dasar pengambilan keputusan :

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas
- 2 . Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji scatter plot

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 4.1

Sumber :Data diolah dari (BPS) Kabupaten Lamongan 2005-2017

Dasar pengambilan keputusan cara *kolmogrov smirnov*.

Asymp. Sig > 0,05, maka data berdistribusi normal.

Asymp. Sig < 0,05, maka data berdistribusi tidak normal.

Kolmogorov smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		13
Normal Parameters ^a	Mean	9,020200
	Std. Deviation	0000000
	Absolute	114
Most Extreme Differences	Positive	.284
	Negative	-.141
Kolmogorov-Smirnov Z		.410
Asymp. Sig. (2-tailed)		.246

Tabel 4.5 Dari tabel di atas diketahui nilai Asymp Sig (2-tailed) sebesar 0,246 di bandingkan dengan nilai signifikansi sebesar $> 0,05$. Sehingga dapat dikatakan bahwa residual model berdistribusi normal.

4.4.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apabila model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen, jika variabel independen saling berkaitan, kemiripan antar variabel bebas dalam satu model akan menyebabkan korelasi yang sanagat kuat antara variabel bebas dengan variabel yang lain. Multikolinearitas tidak akan terjadi jika hasil perhitungan VIF (*Varian Inflation Factor*) tidak lebih besar dari 10 dan nilai *Tolerance* tidak

kurang dari 0,1 (Ghozali, 2006:91). Hasil analisis terhadap multikolinearitas disajikan dalam tabel 4.5 sebagai berikut :

Tabel 4.6

Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Beta	Zero-order	Partial	Partial	Tolerance
1 (Constant)	-.143	2.168		-.066	.949					
penyerapan tenaga kerja	.695	.214	1.216	3.252	.010	.280	.735	.721	.352	2.840
investasi pemerintah	-.002	.030	-.018	-.073	.944	.033	-.024	-.016	.828	1.208
investasi swasta	.090	.030	1.171	3.052	.014	.185	.713	.677	.334	2.990

Berdasarkan Tabel 4.5 diatas diketahui bahwa nilai VIF (*Varian Inflation Factor*) dari semua variabel adalah bernilai < 10 dan nilai *Tolerance* tidak $> 0,1$, sedangkan syarat terjadinya multikolinearitas adalah memiliki nilai VIF > 10 dan nilai *Tolerance* tidak $> 0,1$ Sehingga dapat disimpulkan bahwa, dalam penelitian ini tidak terjadi adanya multikolinearitas.

4.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji *Heterokedastisitas*, bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidak samaan varian dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain. untuk mendeteksi ada atau tidaknya *Heterokedastisitas*, menggunakan *uji glejser* yaitu apabila unstandardized residual menghasilkan nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak ditemukan adanya masalah heteroskedastisitas. Dari hasil analisis dapat disajikan dalam tabel 4.6 sebagai berikut:

Tabel 4.7
Uji Heterokedastisitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.143	2.168		-.066	.949
penyerapan tenaga kerja	.695	.214	1.216	3.252	.010
investasi pemerintah	-.002	.030	-.018	-.073	.944
investasi swasta	.090	.030	1.171	3.052	.014

Terlihat bahwa tingkat signifikansi variabel Penyerapan (X1) sebesar 0.010 Angka ini masih berada dibawah signifikan 0,05 sehingga variabel bebas X1 bebas dari heterokedastisitas. Tingkat signifikansi variabel Investasi Pemerintah (X2) sebesar 0,944 Angka ini jauh diatas signifikan 0,05 sehingga

variabel bebas X2 bebas dari heterokedastisitas. Tingkat signifikansi variabel Investasi Swasta (X3) sebesar 0,014 Angka Ini jauh diatas signifikan 0,05 sehingga variabel bebas X3 bebas dari heterokedastisitas.

4.5 Koefisien Determinan (uji R^2)

Uji Koefisien Determinan untuk menguji secara keseluruhan variabel bebas Penyerapan Tenaga Kerja, Investasi Pemerintah Investasi Swasta dan Inflasi terhadap Indeks terhadap Sosial Welfare Pengujian ini digunakan untuk melihat sejauh mana besar kerangka yang dapat diterangkan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji koefisien determinan ini bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan modal dalam menerapkan variabel dependen.

Tabel 4.8

Hasil Analisis Koefisien Determinasi Berganda

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.746 ^a	.557	.409	.0037296012	2.185

Sumber :Data diolah dari (BPS) Kabupaten Lamongan 2005-2017

Berdasarkan analisis yang dilakukan, nilai koefisien R^2 hitung (Koefisien Determinasi), yakni sebesar ,557. Besaran ini menunjukkan pada efektivitas garis regresi yang diperoleh dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan variabel independen tenaga kerja (X1) investasi pemerintah (X2) investasi swasta (X3) dan inflasi (X4), terhadap kesejahteraan masyarakat (Y) adalah sebesar 55,7%. Selebihnya, yaitu 44,3% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam model regresi yang diperoleh.

4.6 Uji Hipotesis

4.6.1 uji simultan (uji F)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel tenaga kerja, investasi pemerintah, investasi swasta dan inflasi di kabupaten Lamongan tahun 2005-2017 terhadap social welfare secara simultan. Secara simultan variabel tenaga kerja, investasi pemerintah, investasi swasta dan akan terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap social welfare jika nilai probabilitas $F_{hitung} \leq level\ of\ significant$ ($\alpha = 5\%$). Dari hasil analisis uji F dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.9
Hasil Analisis Uji F

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.000	3	.000	3.773	.053 ^a
Residual	.000	9	.000		
Total	.000	12			

Sumber :Data diolah dari (BPS) Kabupaten Lamongan 2005-2017

Berdasarkan hasil pengujian variabel tenaga kerja, Investasi Pemerintah, dan Investasi Swasta pada tabel 4.9 diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 3,773 dan F_{tabel} 3,71 ($3,773 > 3,71$) dengan hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lamongan.

4.6.2 Uji Persial (uji t)

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual menerapkan variasi terikat, Pengujian persial regresi dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara individual

mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat dengan asumsi variabel yang lain itu konstan. Untuk menguji secara keseluruhan variabel bebas Penyerapan Tenaga Kerja, Investasi Pemerintah, Investasi Swasta dan terhadap Sosial Walfare

Tabel 4.10

Hasil Analisis Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.143	2.168		-.066	.949
penyerapan tenaga kerja	.695	.214	1.216	3.252	.010
investasi pemerinta	-.002	.030	-.018	-.073	.944
investasi swasta	.090	.030	1.171	3.052	.014

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:

1. Pengaruh variabel penyerapan tenaga kerja (X_1) terhadap variabel sosial walfare (Y)

Berdasarkan tabel 4.10 dapat dilihat bahwa tingkat probabilitas (α) adalah 0,010. Berarti penyerapan tenaga kerja berpengaruh terhadap sosial walfare karena nilai probabilitas $< 0,05$ maka terbukti kebenarannya (H_1 diterima).

2. Pengaruh variabel Investasi Pemerintah (X_2) terhadap variabel sosial walfare

(Y) Berdasarkan tabel 4.10 dapat dilihat bahwa tingkat probabilitas (α) adalah 0,944 berarti investasi pemerintah berpengaruh terhadap sosial welfare karena nilai probabilitas $>0,05$ maka terbukti kebenarannya (H_1 ditolak).

3. pengaruh variabel investasi swasta (X_3) terhadap sosial welfare (Y) Berdasarkan tabel 4.10 dapat dilihat bahwa tingkat probabilitas (α) adalah 0,014 maka investasi swasta berpengaruh terhadap sosial welfare karena nilai probabilitas $< 0,05$ maka terbukti kebenarannya (H_1 diterima).

4.7 Pembahasan

4.7.1 Pengaruh Penyerapan Tenaga Kerja (X1) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat dan kesempatan kerja saling keterkaitan, kesempatan kerja digambarkan oleh jumlah penduduk yang bekerja dan serta menggambarkan peran masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan yaitu kesejahteraan masyarakat. Dari tabel 4.10 Dapat diketahui bahwa Hasil pada regresi linier berganda pada uji t terhadap hipotesis pertama (H_1) diterima, berarti secara parsial variable Penyerapan Tenaga Kerja mempunyai pengaruh signifikan terhadap Social Welfare di Kabupaten Lamongan. Dengan melihat taraf signifikannya yaitu sebesar 0,010. Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa Penyerapan Tenaga Kerja berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Lamongan

. Penyerapan Tenaga Kerja merupakan penentu dari Kesejahteraan Masyarakat. Secara umum dikatakan, semakin banyak Penyerapan Tenaga Kerja (Masyarakat yang Bekerja), semakin besar jumlah keluarga Sejahtera. Akan tetapi di Kabupaten Lamongan tingkat pencari kerja lebih banyak di bandingkan angkatan kerja, Dalam teori ekonomi terdapat asumsi dasar mengenai sifat dari faktor produksi yaitu tunduk pada suatu hukum yang disebut sebagai hukum hasil lebih yang semakin berkurang (The Law Of Diminishing Return). Hukum ini menyatakan bahwa jika faktor produksi tenaga kerja ditambah lowongan tenagakerja dan modal, maka tambahan hasil produksi yang diperoleh dari setiap tambahan satu unit tenaga kerja yang ditambahkan tersebut pada mulanya selalu

meningkat, tetapi penambahan input selanjutnya justru akan menyebabkan tambahan hasil produksi yang semakin menurun.

Menurut Tri Wahyu R, (2004). Penyediaan lapangan kerja merupakan salah satu tujuan pembangunan ekonomi, terutama di Indonesia, dimana pertumbuhan angkatan kerja lebih besar dibandingkan pertumbuhan kesempatan kerja. Pembangunan ekonomi yang semakin meningkat dan membaik akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sehingga mempengaruhi ketersediaan tenaga kerja disuatu daerah. Permintaan tenaga kerja adalah keseluruhan hubungan antara berbagai tingkat upah dan jumlah orang yang diminta untuk dipekerjakan. Sedangkan jumlah tenaga kerja yang diminta lebih ditujukan kepada kuantitas atau banyaknya permintaan tenaga kerja pada tingkat upah tertentu

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Riang (2019) yang menyatakan bahwa penyerapan tenaga kerja berpengaruh terhadap sosial welfare. Jadi dapat disimpulkan bahwa Penyerapan Tenaga Kerja berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Lamongan.

4.7.2 Pengaruh Investasi Pemerintah (X2) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Hasil regresi linear berganda pada uji t hipotesisi ke dua (H_2) Investasi Pemerintah dapat di lihat pada tabel 4.10 bahwa investasi pemerintah dengan melihat taraf signifikannya yaitu 0,944. Artinya semakin besar Investasi Pemerintah tidak akan mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat (H_2 ditolak)

Investasi dipandang sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Semakin cepat perkembangan investasi ketimbang laju pertumbuhan penduduk, semakin cepat pula perkembangan volume stok kapital rata-rata per tenaga kerja. semakin tinggi rasio kapital per tenaga kerja cenderung makin tinggi pula kapasitas produksi per tenaga kerja. Investasi pemerintah adalah faktor penting dalam mendorong perekonomian dan menambah lapangan pekerjaan di Kabupaten Lamongan, kekurangan investasi pemerintah yang mengakibatkan kurangnya investor yang ingin berinvestasi,

karena kondisi geografi sehingga investor akan beresiko tinggi, namun berapapun hasil dari investasi pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan sosial yang di pengaruhi oleh pendapatan yang diterima para pekerja, sehingga masyarakat di Kabupaten Lamongan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga investasi pemerintah dalam penelitian ini tidak mempengaruhi kesejahteraan masyarakat

Teori Harrod-Domard menyimpulkan bahwa investasi memiliki pengaruh ganda untuk jangka panjang (*long-term*). Pada satu sisi, investasi berpengaruh terhadap perkembangan produksi nasional suatu negara karena tersedianya stok modal yang menjadi faktor penting kelangsungan dunia usaha. Di sisi lain, investasi berpengaruh pada permintaan agregat. Oleh karena itu, untuk mencapai *steady-state growth* atau pertumbuhan ekonomi yang mantap diperlukan kondisi di mana para pelaku usahanya memiliki harapan dan pandangan yang cenderung stabil

Investasi Pemerintah Teori dasarnya secara langsung atau tidak investasi pemerintah dapat mendorong investasi swasta. Seperti dalam penelitian Aschauser (1989) adalah investasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada umumnya investasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang oleh pemerintah pusat dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fatikhudin (2011). Yang menyatakan bahwa Investasi Pemerintah berpengaruh terhadap Sosial Welfare, jadi dapat disimpulkan bahwa Investasi Pemerintah tidak berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Lamongan

4.7.3 Pengaruh Investasi Swasta (X3) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Hasil regresi linier berganda pada Uji t terhadap hipotesis ke tiga (H_3) dapat di lihat pada tabel 4.11 bahwa Investasi Pemerintah berpengaruh terhadap Sosial Welfare dengan nilai signifikan sebesar 0,014. Artinya semakin tinggi Investasi Pemerintah maka akan meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (H_3 diterima)

Investasi Menurut Sukirno (1994: 107) dalam buku pengantar ekonomi makro mengartikan investasi ialah pengeluaran modal perusahaan guna mengadakan jasa atau barang dan berbagai perlengkapan produksi yang dapat meningkatkan kemampuan produksi barang ataupun jasa didalam perekonomian. Dan investasi juga tidak hanya untuk memaksimalkan hasil (*output*) namun juga menentukan. peningkatan jumlah tenaga kerja, pendapatan dan peningkatan kualitas teknologi. Sedangkan Harrod dan Dommar mengumpamakan sebuah investasi sebagai kunci yang berperan ganda terhadap proses pertumbuhan ekonomi, beberapa investasi yaitu: pertama, investasi berperan ganda yang mampu mewujudkan peran laju pendapatan dan kedua investasi berperan membesarkan kuantitas produksi dalam perekonomian dengan jumlah stok modal ditingkatkan (Jhingan, 2004: 229).

Menurut Verma, (2005). Penumpukan modal publik yang tinggi akan berpengaruh pada peningkatan pertumbuhan investasi negara dan tercapainya suatu keadaan *crowding out* yang berimbas pada investasi swasta Tingkat *output* yang mengalami peningkatan akan memberikan imbas pada investasi swasta, hal tersebut pastinya campur tangan pemerintah dalam berinvestasi Investasi Swasta Investasi sektor swasta merupakan investasi yang dilakukan bersumber pada pihak swasta nasional, masyarakat, perusahaan atau lembaga dengan harapan memperoleh profit dan pendapatan serta didorong adanya perbesaran pendapatan. *Effecive demand* dikatakan apabila diikuti bertambahnya pendapatan bertambah yang membuat konsumsi juga bertambah. Investasi swasta pada umumnya diperuntukan bagi usaha-usaha yang bisa mengembangkan perekonomian.

Investasi tersebut dilakukan secara langsung melalui pembelian obligasi, surat berharga dalam jangka panjang sekurang kurangnya satu tahun.

Investasi swasta adalah faktor penting dalam mendorong perekonomian dan menambah lapangan pekerjaan di Kabupaten Lamongan, kekurangan investasi swasta yang mengakibatkan kurangnya investor yang ingin berinvestasi, karena kondisi geografi dan kurangnya pemerataan pembangunan sehingga investor akan beresiko tinggi, namun berapaun hasil dari investasi swasta tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan sosial yang di pengaruhi oleh pendapatan yang diterima para pekerja, sehingga masyarakat di Kabupaten Lamongan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga investasi swasta dalam penelitian ini tidak mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Efendi (2015) yang menyatakan bahwa Investasi Swasta berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Lamongan.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian yang di lakukan di kabupaten Lamongan selama periode 2005 – 2017 dengan variabel penyerapan tenaga kerja, investasi pemerintah, investasi swasta, dan inflasi terhadap social welfare, penelitian ini menghasilkan kesimpulan

5. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel penyerapan tenaga kerja (X1), investasi pemerintah (X2), dan investasi swasta (X3), terhadap sosial welfare (Y)

1. Dari hasil pengujian hipotesis diketahui :

- a Hasil pengujian regresi berganda atas penyerapan tenaga kerja terhadap Kesejahteraan Masyarakat menunjukkan pengaruh signifikan ini membuktikan bahwa semakin besar penyerapan tenaga kerja akan meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Lamongan
- b Hasil pengujian regresi berganda atas investasi pemerintah terhadap Kesejahteraan Masyarakat menunjukkan pengaruh tidak signifikan ini membuktikan bahwa semakin besar Investasi Pemerintah tidak akan meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
- c Hasil pengujian regresi berganda atas Investasi Swasta terhadap Kesejahteraan Masyarakat menunjukkan pengaruh signifikan ini membuktikan bahwa semakin besar Investasi Swasta akan meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

5.2 Saran

Saran yang diperoleh dari hasil penelitian sebagai berikut:

1. Dengan hasil penelitian ini maka diharapkan untuk pemerintah kabupaten Lamongan kedepannya memberikan kebijakan yang tepat sasaran dan memperhatikan penguatan peran kelembagaan pemerintah, agar menjaga

pengeluaran dengan baik, untuk itu di butuhkan manejerial yang baik juga supaya dana yang ada dapat di salurkan sesuai dengan yang di rencanakan.

2. Dengan hasil ini diharapkan diharapkan bisa meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui penigkatan alokasi anggaran untuk pndidikan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan memberikan pelatian untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja serta memperluas kesempatan kerja.
3. Hasil penelitian ini diharapkan bisa membrikan dampak kepada pemerinta kabupaten Lamongan,dapat menetapkan langka-langka penyelesaian strategi dalam proses penyerapan tenaga kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, Lincolin. 1999. *Ekonomi Pembangunan* Cetakan I Edisi 4, Yogyakarta
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN

Eny, R. 2007. *Effect of Regional Development Disparity on Employment
Structure and Socio-ekonomik Welfare in East Kalimantan Region*. Surabaya:
Universitas Airlangga.

BPS Kabupaten Lamongan. 2017 *PDRB Kabupaten Lamongan Menurut
Lapangan Usaha Tahun 2010-2017*.

BPS Kabupaten Lamongan.2012. *Kabupaten Lamongan Dalam Angka 2012*

BPS Kabupaten Lamongan.2013. *Kabupaten Lamongan Dalam Angka 2013*

BPS Kabupaten Lamongan.2014. *Kabupaten Lamongan Dalam Angka 2014*

BPS Kabupaten Lamongan.2015. *Kabupaten Lamongan Dalam Angka 2015*

BPS Kabupaten Lamongan.2016. *Kabupaten Lamongan Dalam Angka 2016*

BPS Kabupaten Lamongan.2017. *Kabupaten Lamongan Dalam Angka 2017*

BPS Kabupaten Lamongan.2018. *Kabupaten Lamongan Dalam Angka 2018*

Idris, Amirudin. 2016. *Pengantar Ekonomi Sumberdaya Manusia*. Yogyakarta:
Depublisher

Gilarso,T. 2004. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. Yogyakarta: KANISIUS

Azzumar. 2011. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dan Perimbangan, Investasi
Swasta, Tenaga kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Era*

Desentralisasi Fiskal provinsi Jawa tengah, universita diponegoro.
Semarang.

Gujarati, Damodar N. 1993. *Dasar-Dasar Ekonometrika Edisi Ketigs Jilid 1*.
Jakarta: Erlangga

Djamin, Zulkarnain. 1995. *Struktur Perekonomian dan Strategi Pembangunan
Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Suparmoko. 2008. *Ekonomi Pembangunan. Edisi 6*. Yogyakarta BPFE.

Suwandika. 2015. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Investasi Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran di Provinsi Bali*. Bali :
Universitas udayana

Bordiono, 1999. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, Yokyakarta: BPFE

Kuncoro, M. 2006. *Ekonomi Pembangunan, Teori,Masalah, dan Kebijakan*
Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Sulistiawati. 2012. *Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan
Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Indonesia*.
Pontianak: Universita Tanjungpura,

Irwan, & Saparmoko,M. 2002 *Ekonomi Pembangunan*. Yokyakarta: UPP STIM
YKPN.

Awandri & indrajaya. 2016. *Pengaruh infrastruktur, investasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kesempatan kerja*. Bali: Universitas Udayana

Sukirno, S. 2000. *Pengantar Teori Makro Ekonomi Edisi kedua*. Jakarta: Rajawali Pers.

Effendie. 2015. *The Effect of Government Capital Expenditure and Private Investment on Social Welfare*. Surabaya: Universitas Airlangga

Bambang, S. 2013. *Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Growth and Social Welfare*. Balikpapan: STIE Madani

Sugiono, 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Pambudi & Syairozi. 2019. *Analisis Peran Belanja Modal dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampak pada Kesejahteraan Masyarakat*. Lamongan : Universitas Islam Lamongan.

Alexandra Hukum. 2014. *Hubungan Ketenagakerjaan Dan Perubahan Struktur Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Palangkaraya: Universitas Palangkaraya.

Todaro, M.P., Smith S.C. 2006. *Pembangunan Ekonomi Edisi ke-sembilan*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.

Fathudin. 2012. *Effects of Private and Government Investment on Economic Growth, Labor Absorption and District/City's Public Welfare Level in East Java Province*. Surabaya: Universitas Airlangga

Husodo,S.Y. 2009. *Menuju welfare state*. Jakarta: Baris Biru.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

no	tahun	penyerapan tenaga kerja	Investasi Pemerintah	Investasi Swasta
1	2005	30,673	136.800.000	363.550.537,75
2	2006	32,185	34.900.000	304.820.845,00
3	2007	31,280	7.974.600.000	354.811.456,46
4	2008	27,981	694.990.000	783.556.816,00
5	2009	29,415	501.396.336	298.161.587,54
6	2010	35,488	1.463.213.851	487.228.131,75
7	2011	30,885	3.043.627.755	821.656.138,01
8	2012	31,885	2.780.872.257	837.893.280,10
9	2013	32,387	206.385. 280	767.015.127,50
10	2014	42,387	973.400,41	1.180.197.626,85
11	2015	46,744	394.410.153	822.323.217,14
12	2016	48,319	313.534.188	820.037 .876.48
13	2017	50,893	6.530.291	82003787648

LAMPIRAN 2 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.143	2.168		-.066	.949
	penyerapan tenaga kerja	.695	.214	1.216	3.252	.010
	investasi pemerintah	-.002	.030	-.018	-.073	.944
	investasi swasta	.090	.030	1.171	3.052	.014

a. Dependent Variable: XE

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.746 ^a	.557	.409	.0037296012	2.185

a. Predictors: (Constant), XC, XB, XA

b. Dependent Variable: XE

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.000	3	.000	3.773	.053 ^a
	Residual	.000	9	.000		
	Total	.000	12			

a. Predictors: (Constant), XC, XB, XA

b. Dependent Variable: XE

LAMPIRAN 3 Uji Asumsi Klasik

a.UJINORMALIS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		13
Normal Parameters ^a	Mean	9,020200
	Std. Deviation	0000000
Most Extreme Differences	Absolute	114
	Positive	.284
	Negative	-.141
Kolmogorov-Smirnov Z		.410
Asymp. Sig. (2-tailed)		.246

a. Test distribution is Normal.

Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1 (Constant)	-.143	2.168		-.066	.949					
penyerapan tenaga kerja	.695	.214	1.216	3.252	.010	.280	.735	.721	.352	2.840
investasi pemerintah	-.002	.030	-.018	-.073	.944	.033	-.024	-.016	.828	1.208
investasi swasta	.090	.030	1.171	3.052	.014	.185	.713	.677	.334	2.990

a. Dependent Variable: XE

Uji Heterokedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.143	2.168		-.066	.949
	penyerapan tenaga kerja	.695	.214	1.216	3.252	.010
	investasi pemerintah	-.002	.030	-.018	-.073	.944
	investasi swasta	.090	.030	1.171	3.052	.014

LAMPIRAN 4 UJI HIPOTESIS

a. Hasil Uji F**ANOVA^b**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.000	3	.000	3.773	.053 ^a
	Residual	.000	9	.000		
	Total	.000	12			

.a Dependent Variable: XE

b. Hasil Uji t**Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.143	2.168		-.066	.949
	penyerapan tenaga kerja	.695	.214	1.216	3.252	.010
	investasi pemerintah	-.002	.030	-.018	-.073	.944
	investasi swasta	.090	.030	1.171	3.052	.014

a. Dependent Variable: X

c. Uji Koefisien Determinan**Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.746 ^a	.557	.409	.0037296012	2.185

a. Predictors: (Constant), XC, XB, XA

b. Dependent Variable: XE